



Buletin Parlementaria

Nomor 1208/III/VII/2022 • Juli 2022



Komisi IV Apresiasi Inovasi Riset Budi Daya Padi Gogo di Lampung



**3 Puan Maharani: Perbaiki
Tata Kelola Komoditas
Pangan Untuk Atasi
Harga yang Terus Naik**



**9 Taufik Basari Desak
Kekerasan Seksual
di SMA SPI Segera
Diselesaikan**



9 772614 339005

Komisi IV Apresiasi Inovasi Riset Budi Daya Padi Gogo di Lampung

Mendukung penuh cita-cita mewujudkan ketahanan pangan nasional, Komisi IV DPR RI mengapresiasi PT Huma Indah Mekar (PT HIM), bagian dari PT Bakrie Sumatera Plantation, yang mengupayakan inovasi riset budi daya Padi Gogo di Provinsi Lampung. Tanpa adanya dorongan inovasi riset ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai Indonesia akan kesulitan memenuhi pasokan pangan.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin usai memimpin Tim Kunjungan

Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau lokasi percontohan *Rice Estate* di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung. Selasa (12/7). Ia menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah beserta pihak swasta harus saling bersinergi agar inovasi riset budi daya Padi Gogo tetap berlanjut.

"Kami memberikan apresiasi kepada PT HIM, anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantation untuk inovasi (budi daya Padi Gogo) yang dilakukan dalam sektor ketahanan pangan dan gizi. Tentu saja, ini tidak bisa diabaikan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah harus hadir

memberikan perhatian," ucap Sudin.

Bagi Sudin, sinergi pemerintah dan swasta jadi hal yang vital. Dari sudut pandangnya, ia sangat memahami tantangan utama sektor pertanian adalah kenaikan harga pangan akibat situasi geopolitik, produksi dalam negeri yang cenderung menurun, perubahan iklim, dan merebaknya penyakit hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, setiap pihak yang berkelindan juga harus mengantisipasi sejumlah tantangan pangan tersebut.

Selain itu, Sudin menekankan pendampingan dan masukan, terutama dari aspek budi daya dan kesesuaian agroekosistem spesifik di lapangan juga diupayakan untuk keberlangsungan inovasi budi daya Padi Gogo ini. Sehingga, tegas politisi PDI-Perjuangan itu, hasil budi daya pangan di Lampung menghasilkan produksi yang maksimal.

Hingga saat ini, budi daya Padi Gogo tahap I di Tubaba memiliki area luas tanam sebesar 84 hektar. Masing-masing varietas yang ditanam untuk budi daya Padi Gogo adalah varietas Inpago Unsoed I, Situ Patenggang, Inpago Unsoed Protani, IPB gG, dan Inpago 10. • **ts/sf**



FOTO: SAUIM/MAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau lokasi 'Rice Estate' di Tulang Bawang Barat, Lampung.

Puan Maharani: Perbaiki Tata Kelola Komoditas Pangan untuk Atasi Harga yang Terus Naik

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap harga komoditas pangan yang terus naik sejak jelang Hari Raya Iduladha. Harga komoditas pangan yang belum stabil cukup memberatkan masyarakat. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) terbaru, harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Indonesia mencapai Rp102 ribu/kg.

Bahkan di Jakarta, harga cabai rawit merah hari ini menembus Rp160 ribu/kg. "Kami mendorong Pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Tata kelola komoditas pangan harus diperbaiki untuk mengatasi harga-harga yang terus meroket, khususnya harga cabai dan bawang merah," ungkap Puan dalam keterangan persnya, Selasa (12/7). Harga bawang merah juga masih mengalami kenaikan menjadi Rp80 ribu/kg dari sebelumnya Rp40 ribu/kg.

Puan mengatakan harus ada upaya konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan usai Iduladha. "Harga cabai, bawang merah, daging ayam sudah sebulan lebih naik terus. Dalam beberapa kesempatan ketika saya mengunjungi pasar-pasar tradisional di sejumlah



FOTO: ENO/MIAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

daerah, pedagang dan pembeli mengeluhkan harga-harga yang masih tinggi," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Harga cabai yang terus naik pun salah satunya disebabkan karena suplai dari daerah produksi berkurang. DPR meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sistem supply and demand bahan pangan pokok. "Dalam mengatasi persoalan ini, dibutuhkan juga koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait sistem logistik bahan pangan," sebut politisi PDI-Perjuangan itu. • **rnm/sf**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiaryah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantiti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inandri, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonarricha Firsta Dysie, Belgays Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danurto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Aldhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Melalui Komisi I DPR RI, pembahasan RUU PDP bersama pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja. RUU PDP sendiri telah diinisiasi sejak tahu 2016 lalu. Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.

pembahasan sanksi belum menemui kata sepakat, sebab masih terdapat perdebatan terkait sanksi yang tepat bagi penyalahguna data pribadi.

Meski demikian, lanjut politisi Partai Golkar itu, Komisi I DPR telah mendapat waktu tambahan merampungkan pembahasan RUU PDP. Teranyar, penambahan waktu diberikan pada penutupan Masa Sidang ke-V Tahun Sidang 2021-2022. "Sudah diminta waktu perpanjangan satu kali lagi masa persidangan," jelas Nurul.

Adapun, sambung legislator dapil Jawa Barat I tersebut, Komisi I DPR RI menargetkan proses pembahasan RUU PDP berjalan lancar, sehingga bisa segera disahkan pada masa sidang berikutnya atau Agustus mendatang. "Insya Allah kita mengejar tahun ini supaya *kelar*, karena (UU ini) penting *banget*," komitmen Nurul. •
tn/sf

”

KOMISI I DPR RI MENARGETKAN PROSES PEMBAHASAN RUU PDP BERJALAN LANCAR, SEHINGGA BISA SEGERA DISAHKAN PADA MASA SIDANG BERIKUTNYA ATAU AGUSTUS MENDATANG.

"(RUU PDP masih membahas) tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana," kata Nurul dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Senin (11/7). Nurul menegaskan,

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin.



FOTO: JAKA/MAN

Scan QR untuk berita selengkapny



Penyelenggara Pemilu dan Pemda Harus Aktif Sinergikan Data Kependudukan

Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, berbagai macam tahap persiapan terus digalakkan guna mendukung kelancaran perhelatan politik lima tahunan ini, salah satunya terkait pemutakhiran data pemilih.

Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan perlu adanya pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk beradministrasi yang masih rendah, dapat memicu ketidakakuratan DPT nantinya.

Demikian diungkapkan Doli saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Ketua KPU Kepri, serta Ketua Bawaslu Kepri, di Batam, Kepri, Senin (11/7).

"Contohnya, ada anggota keluarga yang meninggal, belum tentu keluarganya memiliki kesadaran melaporkan kepada aparat pemerintah, baik itu ke desa maupun ke kelurahan. KPU



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

”

ADANYA PENCOCOKAN ANTARA DATA DI PEMERINTAH DAERAH DENGAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) YANG DIMILIKI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU). MENURUTNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERADMINISTRASI YANG MASIH RENDAH, DAPAT MEMICU KETIDAKAKURATAN DPT NANTINYA

Kepulauan Riau sudah baik sudah berkoordinasi dengan dinas pemakaman," ujar Doli.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihak penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau perlu melakukan sinergi data DPT. Tak hanya itu, menurut Doli, perlu juga segera disosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data kependudukan.

"Harus ada terobosan yang lebih proaktif, pertama sinergi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah harus terbuka, yang kedua harus lebih aktif lagi jemput bola serta sosialisasi lagi ke masyarakat agar lebih sadar tentang administrasi kependudukan," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut. • **pdt/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnya



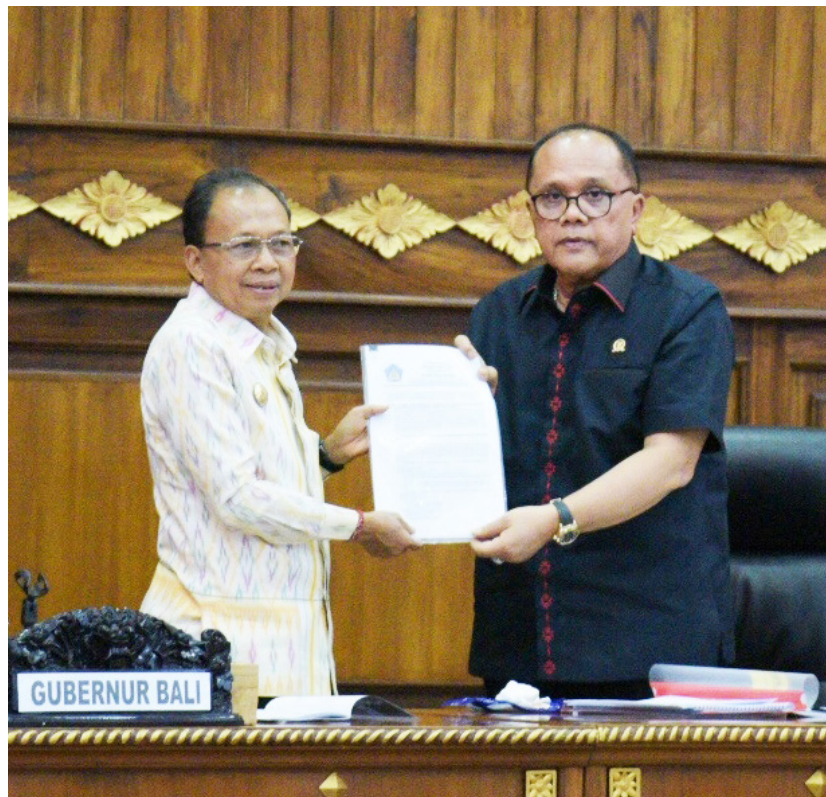
Perlu Koordinasi Berbagai Pihak untuk Terbitkan Sertifikat Tanah PTSL di Bali

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan kepada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktur Jenderal Tata Ruang dan Kepala Kantor Wilayah perlu membangun koordinasi dan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi penerbitan sertifikat yang dianggap tidak sah padahal sertifikat itu adalah pelaksanaan dari Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh pemerintah.

"Hal ini diperlukan, dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi seperti kejadian di (Kabupaten) Bogor, adanya sertifikat (tanah) yang dianggap tidak sah, padahal sertifikat itu adalah hasil dari PTSL yang diserahkan langsung secara simbolik oleh Pak (Presiden) Jokowi. Kita tidak mau itu terjadi di (Bali) sini," kata Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Denpasar, Bali, Senin (11/7).

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, koordinasi komunikasi beberapa pihak tersebut sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu. Hal ini sangat diperlukan karena program PTSL tersebut masih belum diyakini oleh sebagian masyarakat, mereka belum meyakini



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menerima aspirasi dari Gubernur Bali.

bahwa PTSL bisa menjamin hak mereka sebagai pembeli tanah.

"Kita minta supaya di dalam penerbitan PTSL itu, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan APH, Gubernur dan Kepala Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu," tegas Junimart.

Legislator dapil Sumatera Utara III itu menambahkan, memang

masalah pertanahan di Bali tidak begitu bergejolak, tetapi terkait koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan. "Sudah terbukti program Pak Jokowi itu berjalan di Bogor, sertifikat dibagikan secara simbolik ternyata tanah tersebut di police line, disita oleh satgas dari Bareskrim. Ini menjadi pelajaran ke depan dan kami tekankan supaya koordinasi komunikasi perlu antara Kementerian (ATR/BPN) dengan APH," pungkas Junimart. • cas/sf

FOTO: CHASBI/MAN

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi II Soroti **Pengelolaan Dana Desa** oleh Pemerintah Desa di Riau



FOTO: AGUNG/MAH



Scan QR untuk berita selengkapnya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI berfoto bersama Gubernur Riau Syamsuar.

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Pekanbaru, Riau. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin Tim Kunker, salah satu tujuan kunjungan ini ialah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan pengelolaan dana desa di provinsi yang dijuluki 'Bumi Lancang Kuning' tersebut.

Terutama, terang Syamsurizal, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Salah satu isunya ialah adanya aksi pemecatan staf pemerintah desa oleh kepala desa. "Dari paparan yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengatakan tidak ada pelanggaran seperti itu," ujar Syamsurizal saat ditemui di Kantor Gubernur Riau usai pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, di Pekanbaru, Riau, Senin (11/7).

Komisi II DPR RI juga melakukan pengawasan penggunaan dana desa, terutama menyoroti bagaimana Pemprov Riau ikut serta dalam

memantau dan/atau mengawasi penyimpangan penggunaan Dana Desa oleh oknum-oknum Kepala Desa atau perangkat desa yang ada di Provinsi Riau. "Sebab terkadang pemerintah desa kurang pemahaman dalam pengelolaan keuangannya, sehingga ada potensi penyelewengan," urai Syamsurizal.

Legislator dapil Riau I itu berharap ke depannya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, demokratis, bersih dan bebas dari KKN. Mengingat pemerintah desa punya peran memberikan pelayanan dasar, mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dasar. • **aha**

Johan Budi: RKUHP Perlu Segera Disahkan, Tapi Tetap Harus Buka Ruang Masukan Publik

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Pribowo menegaskan pentingnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk segera disahkan. Meski begitu, ia menilai masih perlunya dibuka kembali ruang bagi publik untuk memberikan masukan dalam pembahasan *beleid* yang akan menjadi panduan hukum pidana di Indonesia itu. Ia menyebut, pembahasan RKUHP sudah lama dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"RKUHP perlu segera disahkan, tapi kalau menurut saya pribadi, dibutuhkan juga ruang untuk menerima masukan-masukan dari publik," kata Johan Budi dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, Selasa (12/7). Ia juga mengingatkan, Indonesia belum memiliki panduan hukum pidana murni buatan bangsa sendiri sebab KUHP yang digunakan saat ini adalah warisan Belanda.

"Pembahasan RKUHP ini sudah puluhan tahun dibahas, bahkan dari zamannya sebelum Presiden Jokowi. Jadi prosesnya panjang. Setelah puluhan tahun, setelah beberapa presiden, kita belum punya *handbook* hukum pidana. Kita *enggak* punya yang *bener-bener* murni punya kita. Maka penting sekali untuk segera disahkan. RKUHP *urgent* karena perjalanannya sudah panjang. Sudah dibahas bertahun-tahun, *enggak*



Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Pribowo.

selesai-selesai," jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Johan Budi mengatakan, Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM akan membahas *draft* terbaru RKUHP dalam masa sidang

”

KITA BELUM PUNYA HANDBOOK HUKUM PIDANA. KITA ENGGAK PUNYA YANG BENER-BENER MURNI PUNYA KITA. MAKA PENTING SEKALI UNTUK SEGERA DISAHKAN.

DPR RI berikutnya, yakni pada bulan Agustus 2022. "DPR dan Pemerintah tidak boleh menutup ruang untuk menerima masukan terkini dari kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pakar-pakar hukum," tutur legislator dapil Jawa Timur VII itu.

Namun, menurut Johan Budi, ruang diskusi bersama elemen masyarakat saat ini harus dibatasi agar tidak melebar. Sebab pembahasan RKUHP sudah pada kesepakatan pembahasan tingkat I di DPR yang waktunya pun sudah cukup lama. "Masukannya cukup yang 14 poin itu saja. Kalau kita debat terus, (RKUHP) *enggak* selesai-selesai. Jadi masukannya mengerucut di 14 isu krusial itu," imbaunya. • **bia/sf**

FOTO: RINI JAKA/MAN





Taufik Basari Desak Kekerasan Seksual di SMA SPI Segera Diselesaikan

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak kasus kekerasan seksual yang menjerat pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) inisial JE segera cepat diselesaikan. Taufik tak ingin beban korban kekerasan seksual semakin berat jika proses hukum berlarut-larut. Tak hanya itu, Taufik menekankan dalam setiap penanganan kasus kekerasan seksual yang dibutuhkan adalah perspektif aparat penegak hukum harus memahami karakteristik kasus kekerasan seksual.

"Karakteristik tersebut antara lain perlunya perlindungan khusus kepada korban, karena banyak korban mengalami trauma dan dapat bertambah berat bebannya serta bertambah traumatis akibat penanganan perkara berlarut-larut. Maka, saya meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian khusus dalam kasus ini, terutama kepada korban," ujar Taufik, dalam keterangan persnya yang diterima **Parlementaria**, Rabu (13/7).

Selain itu, politisi Partai Nasdem itu meminta pihak yang diduga mengintimidasi korban ditindak secara hukum. Oleh karena itu, tandas Taufik, penting bagi pihak

kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan perhatian khusus kepada korban dan saksi-saksi yang terkait dalam kasus ini termasuk dengan memberikan perlindungan dan melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam mengintimidasi korban.

Taufik memaparkan, memang dalam perkara ini Undang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tak bisa diterapkan. Sebab, kasus ini berjalan sebelum UU disahkan. Namun demikian, ia ingin perlindungan korban merujuk pada aturan ini. "Meskipun dalam perkara ini UU TPKS tidak dapat diberlakukan karena *tempus delicti*-nya terjadi sebelum UU tersebut disahkan, semangat perlindungan korban dapat merujuk pada UU ini," tegasnya.

Menutup rilisnya, Taufik berharap aparat bekerja profesional dalam menangani kasus ini. Taufik juga ingin adanya penanganan khusus dalam perkara kekerasan seksual ini. "Kita berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan memperhatikan penanganan khusus yang perlu dilakukan dalam perkara kekerasan seksual," pungkask legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung I itu. • **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari.



FOTO: JAKA/MAN

Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Dapat Kurangi Beban yang Semakin Padat



FOTO: EKO/MAN



Scan QR untuk berita selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau lokasi pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I di Pontianak, Kalbar.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Kalimantan Barat. Dalam pengawasan ini, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau langsung lokasi pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I di Kota Pontianak, Kalbar, Selasa (12/7). Menurut Lasarus, duplikasi Jembatan Kapuas I mendesak untuk dibangun guna mengurangi beban Jembatan Kapuas yang kian hari semakin padat dilalui kendaraan.

Bahkan Lasarus mengungkapkan, rencana pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I akan mulai dikerjakan tahun ini dan pemenang lelang proyek

pengerjaan pembangunan sudah diumumkan. "Dalam waktu dekat pemancangan tiang pertama (groundbreaking) segera dilaksanakan menandai mulai dikerjakannya proyek pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I yang akan berdampingan dengan Jembatan Kapuas I yang sudah ada," kata Lasarus di sela-sela peninjauan.

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, alokasi anggaran pembangunan jembatan tersebut lebih dari Rp30 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp200 miliar. Sebagaimana diketahui, Jembatan Kapuas I yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas, kemudian dari sisi keamanan juga berbahaya karena jembatan tersebut pernah

ditabrak oleh kapal tongkang beberapa kali.

Lasarus berharap dengan adanya pembangunan jembatan bisa mengurangi kemacetan jalan. "Lalu lintas di kawasan ini padat, kita berharap dengan pembangunan Jembatan Paralel, maka kemacetan bisa tertangani dan bisa membagi beban jembatan yang sudah ada sekarang," ungkap legislator dapil Kalimantan Barat II itu.

Saat meninjau lokasi pembangunan duplikasi jembatan Kapuas I Tim Kunker Komisi V didampingi oleh mitra kerja Komisi V, turut hadir Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dan Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin. ● **eko/aha**

Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara



FOTO: EKI/IMAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras (tengah) berfoto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara.

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku Utara pada Jumat (8/7).

Tim Kunker Reses yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras ini melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan, yang juga dihadiri mitra kerja Komisi V DPR, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.

"Kunjungan kerja hari ini dilakukan dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN," papar Andi Iwan dalam sambutannya. Selain itu, sambung Andi Iwan, juga untuk mendengarkan dan menyerap

aspirasi dari Pemerintah Daerah atas kebutuhan program infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara.

Secara rinci, Andi Iwan menyampaikan lima aspek pengawasan yang ia tekankan harus menjadi perhatian mitra kerja Komisi V, pertama, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2022 dengan tetap memperhatikan kualitas dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

"Kedua, meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan transportasi baik transportasi udara, laut, darat, dan perkeretaapian dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," tutur politisi Partai Gerindra tersebut. Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa dan produk unggulan desa dalam mendorong perekonomian masyarakat di desa.

Usai menggelar pertemuan, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR kemudian melakukan tinjauan lapangan ke pemukiman kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Wilayah tersebut merupakan salah satu lokasi yang menjadi proyek *National Slum Upgrading Project* (NSUP) atau peningkatan kualitas permukiman kumuh Kementerian PUPR.

"Kita harapkan daerah kumuh yang tadinya ada di Kota Ternate ini bisa menjadi daerah yang sehat, bersih produktif, kemudian bisa menjadi daerah yang nyaman untuk masyarakat Ternate. Sehingga kemudian meningkatkan perekonomian yang ada di daerah. Yang tadinya kumuh dan tidak ada apa-apa kemudian menjadi daerah yang ekonomis," ujar legislator dapil Sulsel II itu. • eki/sf

Komisi V Harap **Angkutan Udara Tingkatkan Ekonomi Papua**



Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI berfoto bersama mitra kerja terkait, usai membahas pelaksanaan angkutan udara di Jayapura, Papua.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan melalui kunjungan kerja ke Provinsi Papua, dapat dimanfaatkan Anggota Dewan untuk memastikan proses pelaksanaan angkutan orang dan barang melalui udara di wilayah Papua berlangsung dengan baik dan dapat mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya, yang akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal tersebut disampaikan Roberth Rouw saat mengawali pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR), manajemen Angkasa Pura I, BMKG, BNPP, LPPNPI (AirNav) serta kepala bandara se-Papua, di Jayapura, Papua, Selasa (12/7).

"Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, disebutkan bahwa penerbangan diselenggarakan dengan tujuan memperlancar arus perpindahan orang dan barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara, dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional," kata legislator daerah pemilihan (dapil) Papua tersebut.

Roberth menjelaskan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, aspek pengawasan perlu menjadi perhatian agar tetap menjaga pemenuhan kebutuhan alokasi standar pelayanan untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengaturan Ditjen

Hubud terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara serta Angkasa Pura I.

Politisi Partai NasDem itu juga menyampaikan aspek pengawasan lain yang harus diperhatikan. Salah satunya dampak kenaikan harga tiket pesawat terhadap kenaikan harga pada sektor-sektor ekonomi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan pertumbuhan angkutan udara di Papua. Selain itu pihaknya juga menyoroti landasan *runway* Bandara Sentani, Jayapura.

"Kondisi *runway* pada lapangan terbang Sentani yang membutuhkan perpanjangan pada ujung *runway* yang perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi kecelakaan pada saat mendaratnya pesawat. Serta bagaimana dengan perkembangan bandara-bandara di Provinsi Papua dalam menunjang perekonomian daerah perkotaan dan pedesaan," pungkas Roberth. ● **afr/sf**

Scan QR untuk berita selengkapny





Sri Lanka Bangkrut, Rudi Hartono Minta Pemerintah Indonesia Hati-Hati Kelola Utang

Sri Lanka dinyatakan bangkrut karena tak bisa memenuhi kewajibannya membayar utang. Aksi protes pun muncul sebagai buntut dari krisis Sri Lanka. Hal itu pun membuat Presiden Gotabaya Rajapaksa kabur dan mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta agar Pemerintah Indonesia untuk lebih bijak dan hati-hati dalam mengelola utangnya, sebagai antisipasi Indonesia tidak mengikuti jejak Sri Lanka.

"Pemerintah Indonesia harus lebih awas dan waspada melihat kondisi ekonomi Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan. Jangan sampai nantinya beban utang negara makin besar dan uang untuk membayar utang dan bunga tidak siap, sehingga berakibat (Indonesia) seperti (kebangkrutan) Sri Lanka," wanti-wanti Rudi ketika dihubungi **Parlementaria**, Selasa (12/7).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, tata kelola pemerintahan dalam hal kebijakan memberikan subsidi harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Menurutnya, subsidi energi cukup berkontribusi pada kenaikan utang pemerintah. Bila penerimaan negara tak cukup membendung subsidi

energi, utang jadi solusi satu-satunya. Di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi dan penerimaan yang belum optimal di Indonesia, pengalaman Sri Lanka harus menjadi perhatian bersama bagi pemerintah.

"Pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi memang berangsur membaik. Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi juga cukup berpihak ke masyarakat. Tapi kita juga harus lihat, sebagian besar uang negara saat ini digunakan untuk subsidi, BBM salah satunya. Dirut Pertamina juga sudah pernah bilang, harga keekonomian BBM seperti Pertamax dan solar sudah meningkat tajam karena harga migas dunia naik. *Nah* kalau uang sudah *enggak* cukup, berarti harus nambah utang. Tata kelola utang ini yang pemerintah harus bijak," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu. • **sf**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi VI DPR RI
Rudi Hartono Bangun.



FOTO: OJI/MAN

PLTU Diminta Ambil Peran dalam Perbaikan Lingkungan

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Karangkandri sebagai penyangga utama sistem kelistrikan di Pulau Jawa-Bali harus mampu mengoperasikan PLTU secara baik dan benar. Ia menekankan, menjadi sangat penting bagi Komisi VII DPR RI untuk memastikan bahwa tata kelola di PLTU yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Menurut politisi Partai NasDem itu, perusahaan yang saat ini dipegang oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P) tersebut harus benar-benar mampu memaksimalkan unit *growing*-nya yang sudah menggunakan teknologi *ultra supercritical boiler* guna menekan tingkat emisi karbon (CO₂) sebagai limbah dari aktivitas konversi batu bara menjadi energi listrik.

"Memang sistem *ultra critical* ini merupakan teknologi yang sudah maju yang mampu menekan tingkat emisi karbon sampai 40," tutur Sugeng saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wakil Bupati Cilacap dan mitra kerja terkait

di PLTU Karangkandri, Cilacap, Jateng, Senin (11/7).

Legislatur dapil Jateng VIII itu turut mendorong agar PLTU Karangkandri lebih banyak mengambil peran perbaikan lingkungan atas kerusakan maupun pencemaran lingkungan sebagai dampak dari pembangunan maupun aktivitas operasional perusahaan pelat merah tersebut.

"Batu baranya itu kadang menjadi debu, entah itu disapu angin, dan itu

mempengaruhi lingkungan. Selain itu, juga terjadi polusi suara karena beroperasi *blower* dan jensetnya itu 24 jam juga mengganggu lingkungan warga, ketiga adalah intrusi air laut karena pembangunannya juga memanfaatkan air tanah sehingga beberapa sumur di lingkungan pabrik ada yang kering lantas masuklah intrusi air laut maka airnya menjadi air payau," ucap Sugeng.

Bukan tanpa alasan, ia menegaskan hal itu tak hanya secara umum sektor vital nasional dapat handal melakukan ekspansi, namun ekspansi tersebut harus berhubungan pada konsep *zero emission*. "Maka kami perlu cek. Bayangkan batu bara hampir 1 juta ton. Nah itu besar sekali. Maka luncuran karbon di udara pun besar sekali," ujar Sugeng. • **srw/aha**

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.



FOTO: FITRI/MAN

Scan QR untuk berita selengkapny



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI berfoto dengan direksi PT AMNT di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

PT AMNT Diharapkan **Mampu Bantu Pembangunan NTB**

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang memiliki izin pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan mampu berkontribusi jelas atas pembangunan di NTB. Tidak hanya itu, PT AMNT juga didorong melakukan hilirisasi produk hasil pertambangan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan direksi PT. AMNT di Sumbawa Barat, NTB, Senin (11/7). Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke NTB, mengatakan, dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 102, ayat (1), huruf a, ditegaskan, pemegang IUP atau IUPK wajib meningkatkan nilai

tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam.

"Sejak beroperasi penuh pada Maret 2000 hingga saat ini, keberadaan PT AMNT diharapkan memberi kontribusi yang nyata bagi pembangunan dan pengembangan SDM yang ada di Provinsi NTB. Selain itu, keberadaan PT AMNT didorong mampu memberi nilai tambah dari produk hasil pertambangan dengan melakukan hilirisasi," kata Dony. Kunjungan Komisi VII DPR RI ini untuk melihat dari dekat kegiatan pertambangan yang dilakukan PT AMNT sekaligus kontribusinya bagi NTB.

PT AMNT dahulu bernama PT Newmont Nusa Tenggara yang memiliki izin kontrak karya tahun 1986. Pada 15 Agustus 2016

berubah nama menjadi PT AMNT dan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dony menegaskan, sebagai salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, PT AMNT wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengimplementasikan kaidah *Good Mining Practice* dalam kegiatan operasinya.

"Untuk itu, melalui kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada hari ini, kami ingin memperoleh informasi dan penjelasan mengenai gambaran umum kegiatan penambangan PT AMNT yang meliputi kapasitas produksi mineral emas, termasuk tembaga dan perak, juga volume penjualan, baik domestik maupun ekspor," tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI itu. • **mh/aha**

Komisi VII Tekankan Transparansi Data Pengelolaan CPO di Kawasan Industri Dumai



Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Dumai, Riau.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta transparansi data pengelolaan *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya yang berada di Kawasan Industri Dumai, Provinsi Riau, khususnya data terkait jumlah CPO untuk diekspor dan untuk dalam negeri. Menurut Nasir, hal ini berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal sehingga membebankan masyarakat. Ia mengaku kecewa karena beberapa data yang diterima Komisi VII DPR RI tidak menjelaskan secara transparan regulasi yang terjadi di kawasan industri.

"Ada tiga kawasan industri di Dumai ini, tapi hanya satu

kawasan dan itu pun datanya tidak cukup. Kami menginginkan dari mulai TBS (Tandan Buah Segar) sampai pengelolaan CPO maupun minyak goreng ini, kita minta (data) transparan dan kami minta harga TBS ini juga bisa meningkat, supaya masyarakat bisa merasakan bagaimana kelangkaan minyak goreng maupun mahalnya minyak goreng ini setimpal dengan harga TBS." ujar Nasir usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi Wilmar Group, Pemkot Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau beserta jajaran di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin (11/7).

Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebelum diekspor ke luar negeri sehingga masyarakat merasakan besarnya produksi CPO. "Kami minta semua perusahaan-perusahaan (tenant PT Wilmar Group) ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh perhari, berapa per bulan, per tahun, berapa ekspor, berapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri dan berapa harga yang pantas untuk dalam negeri dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor," tuturnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II tersebut juga menuturkan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai jika hasil bumi dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. "Kita minta sesuaikan lah harga TBS ini agar masyarakat bisa nyaman dan terasa (ringan), bisa membuat harga minyak goreng juga terjangkau dan murah untuk masyarakat. Kalau tadi minyak curahnya Rp14.000, maka minyak kemasannya juga di-range harga tersebut. Jadi mungkin bisa diturunkan (ke) Rp10.000, itu jauh lebih baik karena besarnya produksi kita ini harusnya meringankan kebutuhan masyarakat," tandas Nasir kepada **Parlementaria**.

Menindaklanjuti kelengkapan data terkait jumlah produksi minyak goreng dalam negeri dan data ekspor, Komisi VII DPR RI akan segera mengundang mitra kerja terkait. Nasir bersama Anggota Komisi VII DPR RI lainnya akan segera membahas dalam rapat kerja pada masa sidang mendatang. Hal ini dilakukan agar dapat mendalami persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang terjadi belakangan ini. • **ais/sf**



Ketidakakuratan Data Kemiskinan Masih Menjadi Persoalan di Kabupaten Lebak

Ketidakakuratan data kemiskinan bagi yang berhak menerima bantuan sosial dari program Kementerian Sosial masih menjadi persoalan di sejumlah daerah, tak terkecuali di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salah satunya data stunting penerima bantuan di Lebak yang terdaftar sebanyak 4000 warga, sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai angka 40.000 warga. Terdapat perbedaan angka 36.000 warga Lebak, sangat jauh dari angka yang terdaftar *by name* dan *by address*.

"Mengapa (perbedaan) data tersebut bisa sangat jauh. Ini harus segera dicari daripada akar masalahnya mengapa bisa demikian, pasalnya ini bersangkutan dengan nyawa manusia yang harus diberikan pertolongan," kata Anggota Komisi VIII DPR RI saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya bertemu Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi, di Gedung Negara Setda Lebak, Banten, Kamis (7/7).

"Untuk itu, saya dan Komisi VIII akan mengundang lintas kementerian dan lembaga, di masa sidang berikutnya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian



Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan ATENSI kepada masyarakat Lebak, Banten.

Kesehatan, dan juga kementerian atau lembaga terkait tentunya Badan Pusat Statistik (BPS), bisa duduk bersama guna mencari titik temu dari pada persoalan data yang akurat dan valid. Kendati demikian persoalan data sudah menjadi persoalan yang sangat klasik hampir 18 tahun masih saja tidak ada titik temu atau jalan keluar. Diharapkan dengan adanya rapat gabungan bisa terpecahkan persoalan tersebut," harap Hasbi.

Ditambahkan politisi PDI-Perjuangan itu, tidak hanya di Lebak, selama Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, persoalan data kemiskinan masih simpang

siur. Bahkan tidak hanya data kemiskinan, data disabilitas pun tidak akurat. "Saya rasa kesimpangsiuran data tidak terjadi di Lebak saja, namun hampir bisa dikatakan di berbagai daerah. Dengan demikian karena data sangat penting perlu kiranya, saya berharap kita semua mencari jalan keluar agar persoalan keakuratan data yang valid bisa lebih di perbaiki kedepannya sehingga penerima bantuan bisa tersalurkan dan tepat sasaran," harap Hasbi.

Di sisi lain, masih kata Hasbi, Komisi VIII DPR RI ingin

memperbaiki persoalan data tersebut, dengan duduk bersama pihak-pihak terkait. "Atau bisa juga penilaian-penilaian atau kriteria tentang orang-orang miskin yang berhak menerima bantuan sosial, misalnya orang miskin dalam kriteria Kemensos itu seperti apa? Ini sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui apa saja kriteria-kriteria penerima manfaat. Contohnya, kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga dengan penghasilan kurang dari Rp600.000 harus masuk data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), baik di Tangerang, Pandeglang, Cilegon dan Serang," jelas Hasbi. ● rni/sf

FOTO: RINI/MIAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Iskan Qolba Minta **Kemenag** Pangkas Biaya Haji Indonesia Tahun Depan

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 1443 Hijriyah cukup sukses. Namun ada beberapa hal yang sangat penting dalam evaluasi ibadah haji tahun ini. Saat berbincang dengan Menteri Agama RI dalam rangka pengawasan ibadah haji 1443 Hijriyah, Iskan meminta agar biaya penyelenggaraan haji tahun depan bisa dipangkas.

"Saya berharap biaya haji tahun depan bisa ditekan, dengan melakukan nego dari jauh-jauh hari, serta tidak mendadak. Saya akan perjuangkan biaya haji tahun depan bisa turun di angka yang jauh berbeda dengan haji tahun ini," kata Iskan dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Rabu (13/7).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, kuota jemaah haji asal Indonesia tahun depan dapat ditingkatkan lagi. "Kemungkinan di tahun depan sesuai dengan yang saya usulkan kepada Menteri Agama, kita memberangkatkan sebanyak 250 ribu jemaah haji Indonesia. Dalam perbincangan ini juga, saya berharap ke depannya agar Kementerian Agama bisa lebih mempersiapkan khususnya terkait kuota haji yang akan ditambah," kata Iskan.

Selain itu, hal lain yang menjadi

perhatian pengawas haji Komisi VIII DPR RI tahun ini, ialah pemondokan jemaah haji yang relatif jauh.

"Padahal banyak gedung bagus yang lebih dekat yang masih kosong tidak disewa Kementerian Agama. Apalagi jatah haji yang datang cuma setengah jemaah sebelum Covid-19," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu.

Kemudian, lanjut Iskan, biaya di Arafah, Mina dan Muzdalifah yang naik 49 persen tanpa fasilitas yang signifikan juga perlu untuk dievaluasi. "Khususnya terkait biaya haji untuk tahun depan atau 1444 H, kita perlu membicarakannya kembali dari jauh-jauh hari dan saya menyampaikan ini saat berbincang dengan Pak Menteri Agama di Arafah. Saya usul biaya haji tahun depan bisa lebih dipangkas kembali, agar lebih murah ketimbang biaya haji di tahun ini. Dan saya ingatkan dengan syarat nego jauh-jauh hari serta jangan mendadak," tegasnya.

Iskan menyampaikan, catatan terkait biaya dan kuota juga akan dibahas dengan Menteri Agama. "Kita dapat menambah kuota untuk keberangkatan haji di tahun depan dengan semaksimal mungkin. Harapan kita semua tahun depan sudah normal semuanya, khususnya terkait untuk kuota jemaah haji Indonesia. Semoga apa yang kita rencanakan, jauh-jauh hari dapat terealisasi dengan baik. Harapan saya, Menteri Agama dapat mendengarkan usulan ini dan dapat direalisasikan untuk Haji 1444 Hijriyah," harapnya. • **rnm/sf**



Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis.

FOTO: RUMI/MAN

Scan QR untuk berita selengkapny





Nabil Haroen Imbau Masyarakat Tak Lengah Terhadap Lonjakan Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengimbau semua elemen masyarakat tidak lengah terhadap lonjakan kasus penularan Covid-19. Nabil mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan tetap menggunakan masker.

"Imbauan Presiden Joko Widodo penting sekali saat ini. Jangan sampai lengah terhadap lonjakan Covid-19, jangan sampai kecolongan dua atau tiga kali. Jadi, saat ini harus waspada dan ketat secara prosedur untuk situasi normal baru, penggunaan masker jadi penting," kata Nabil, dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, baru baru ini.

Sebagaimana diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia kembali menunjukkan kenaikan beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut menurut Nabil harus menjadi perhatian dan masyarakat bisa merespons dengan meningkatkan kedisiplinan dalam

menggunakan masker. Ia meminta masyarakat jangan sampai lengah, sehingga imbauan untuk penggunaan masker harus benar-benar jadi perhatian dan dijalankan.

Presiden Joko Widodo secara tegas menyampaikan masyarakat harus kembali menggunakan masker di dalam dan di luar ruangan. Selain itu, Nabil meminta pemerintah memperketat pintu masuk di kantor imigrasi, kawasan perbatasan, bandara, dan pelabuhan, karena mobilitas di tempat-tempat

tersebut cukup tinggi. "Sangat penting untuk dikawal. Ini harus jadi prioritas bersama," tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker, menurutnya, perlu ada edukasi dan kampanye penggunaan masker yang lebih mengena di publik. Tokoh-tokoh publik juga harus memberikan contoh dalam upaya mencegah penularan Covid-19.

"Tidak perlu seremonial, tapi yang penting mengena betul di publik. Jadi, kampanye ini penting, juga ada keteladanan dari pemimpin kita," tegas Nabil. • **rnm/sf**



Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen.

FOTO: JAKA/MAN

Hendrawan Supratikno Nilai Indonesia Tidak Akan Masuk dalam Situasi Stagflasi

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai Indonesia tidak akan masuk dalam situasi krisis berdimensi stagflasi. Sehingga, ia meyakini krisis yang terjadi di Sri Lanka tidak akan terjadi di Indonesia. Diketahui, stagflasi adalah krisis yang terjadi secara kombinasi antara stagnasi dan inflasi. Stagnasi ditandai dengan tingginya angka pengangguran karena rendahnya pertumbuhan ekonomi. Sementara inflasi ditandai kenaikan harga secara umum karena jumlah uang yang beredar lebih cepat dibandingkan persediaan barang di pasaran.

"Jadi, stagflasi artinya kondisi ekonomi yang diwarnai oleh dua penyakit terbesar ekonomi yaitu pengangguran sekaligus inflasi. Tetapi, Indonesia agak beruntung karena memiliki tiga kondisi yang jarang dimiliki oleh negara lain yang saat ini krisis," ujar Hendrawan saat dihubungi **Parlementaria** via telepon, Kamis (14/7).

Faktor pertama tersebut adalah pasar domestik di Indonesia sangat besar, ditandai dengan jumlah populasi 270 juta penduduk. Menurutnya, dengan besarnya penduduk Indonesia tersebut akan menjadi 'bantalan' ekonomi ketika pertumbuhan ekonomi dunia melemah. "Karena pasar yang besar, memberikan

peluang kepada industri untuk bergerak atau hidup meskipun dalam kapasitas industri yang tidak begitu maksimal karena pengaruh ekonomi global tadi," ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Faktor kedua adalah Indonesia memiliki produk ekspor komoditas (nonmigas) yang bervariasi di pasar global. Diketahui, ekspor nonmigas ini masih mendominasi total ekspor Indonesia, yakni mencapai 22,84 miliar dolar AS per November 2021. Komoditas unggulan dalam ekspor nonmigas Indonesia meliputi kelapa sawit, batu bara, karet, kopi, teh, dan kakao. Beberapa negara tujuan ekspor beberapa komoditas tersebut di antaranya adalah China, India, Filipina, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, dan sebagainya.

"Ketika ekspor kayu menurun, tetapi tiba-tiba batu bara naik, kelapa sawit naik, nikel naik. Tidak seperti Sri Lanka yang ekspornya terbatas pada satu atau dua komoditas saja," tutur Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Faktor ketiga ketergantungan eksternal Indonesia, khususnya dalam hal keuangan, relatif masih terkendali. Hal itu ditunjukkan dengan rasio utang terhadap GDP masih berada dalam kisaran 39 persen atau setara dengan



FOTO: OJI/MAN

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno.

Rp7.040,32 triliun per April 2022, sementara Sri Lanka menunjukkan angka 107 persen dengan tingkat inflasi sekitar 54,6 persen per Juni 2022 silam.

Debt to GDP ratio Indonesia tersebut masih berada jauh di bawah ketentuan ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen dari GDP. Meskipun demikian, Hendrawan menegaskan, Indonesia harus hati-hati dikarenakan masih menghadapi defisit seperti defisit APBN, dan defisit transaksi berjalan meskipun dalam beberapa bulan ini mencatatkan angka surplus.

"Karena penghasilan yang mendadak naik dari sektor komoditas. Kemudian defisit keseimbangan primer. Dibandingkan negara lain, kondisi fiskal kita meski tidak sehat betul, tetapi masih relatif terkendali. Tiga kondisi ini, membuat ekonomi kita mestinya lebih tahan menghadapi guncangan eksternal," tutup Hendrawan. • **rdn/sf**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Rayakan Iduladha, Setjen DPR Gelar Penyembelihan Hewan Kurban

Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR dan DPD RI menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Iduladha 1443 H, di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/7). Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekretaris Jenderal DPR RI Sumariyandono mengatakan, kegiatan penyembelihan hewan kurban bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) MPR dan DPD RI adalah yang pertama kali dilakukan Setjen DPR RI.

Dono, sapaan akrabnya, berharap kegiatan bersama ini bisa terus dilakukan setiap tahunnya.

"Saya mewakili Pimpinan DPR RI secara khusus berharap pada momentum Hari Raya Iduladha ini dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah serta semakin mempererat tali silaturahmi segenap keluarga DPR/MPR/DPD maupun masyarakat sekitar komplek parlemen ini," katanya.

Menurut Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI tersebut, sunnah penyembelihan hewan kurban selain bentuk ketaatan, kesabaran dan keikhlasan dalam memenuhi perintah Allah SWT. Secara perspektif sosial kebangsaan, juga dapat dimaknai sebagai momentum memupuk toleransi untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

"Daging kurban boleh dinikmati oleh semua kalangan, tidak terbatas untuk umat muslim saja. Ini menunjukkan ibadah kurban adalah ibadah yang bersifat inklusif bukan eksklusif. Inklusivitas sangat penting menumbuhkan semangat toleransi umat beragama. Toleransi yang dijunjung tinggi *founding father* kita adalah kunci terwujudnya NKRI yang penuh keragaman," kata Dono.

Selain mengajarkan semangat toleransi, lanjutnya, dari dimensi sosial Iduladha mengajarkan untuk berbagi sesama, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. "Ajaran berbagi syarat dengan pesan moral berdimensi sosial yang relevan mengatasi tren menguatnya karakter individualis dan apatisisme sebagai efek samping dalam perkembangan masyarakat modern saat ini," ungkap Dono lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman Suratna menyampaikan, jumlah hewan kurban yang disalurkan sebanyak 17 ekor sapi dan 12 ekor kambing. "Alhamdulillah tahun ini penerima hewan kurban meningkat, semoga peningkatan ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah," ungkap Suratna. • **rnm,adi/sf**



FOTO: JAKA/AMAN

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekretaris Jenderal DPR RI Sumariyandono menyerahkan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1443 H.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Setjen DPR Terima Kunjungan Dubes Vietnam Guna Partisipasi dalam Agenda P20



FOTO: RUNI/MAN

Plh. Sekretaris Jenderal DPR RI Sumariyandono bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia H.E. Ta Van Thong di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Sekretariat Jenderal DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia H.E. Ta Van Thong. Kunjungan tersebut diterima oleh Plh Sekretaris Jenderal DPR RI Sumariyandono, Plh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna, dan Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen DPR RI Endah Retnoastuti.

Menurut Dono, sapaan akrab Sumariyandono, kunjungan Dubes Vietnam ini terkait ketertarikan Parlemen Vietnam untuk berpartisipasi dalam kegiatan

Parliamentary 20 (P20) pada November 2022 mendatang. Meskipun demikian, ia menilai niat

”

DUBES VIETNAM YAKIN BAHWA KE DEPAN, KERJA SAMA INDONESIA DAN VIETNAM SEMAKIN BAIK. TERUTAMA KERJASAMA UNTUK ANTARPARLEMEN INDONESIA DAN VIETNAM

baik tersebut perlu mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu. Sebab, saat ini, DPR RI sedang menjalani masa reses. Sehingga, untuk tindak lanjutnya akan disampaikan kemudian.

“Kita sampaikan bahwa ini akan menjadi pertimbangan setelah melaporkan ke Ketua DPR RI terlebih dahulu. DPR RI sedang dalam masa reses dan nanti akan dikomunikasikan jadwal pasti kunjungannya kembali,” jelas Dono di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7). Di sisi lain, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Vietnam yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada Maret 2022 lalu.

Sehingga, meskipun baru menjabat lima bulan sebagai Dubes Vietnam untuk Indonesia, Dono yakin akan banyak penyesuaian yang dilakukan oleh dubes tersebut. “Dubes Vietnam yakin bahwa ke depan, kerja sama Indonesia dan Vietnam semakin baik. Terutama kerjasama untuk antarpallemen Indonesia dan Vietnam,” tutupnya.

Sebelumnya pada forum IPU ke-144 di Bali, Indonesia dan Vietnam sependapat tentang pelaksanaan *net zero emissions* pada 2050 nanti. Vietnam mendukung segala proses pencapaian *net zero emissions*. Dengan hal ini, H.E. Ta Van Thong menyampaikan keyakinan Vietnam dalam kerja sama bilateral akan semakin baik ke depannya. • rdn/sf



Bersama *Task Force* Parlemen Dunia, BKSAP DPR Temui Ketua Parlemen Ukraina

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon bersama dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) *Task Force* untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina berkunjung ke Kyiv dan menggelar dialog dengan Ketua Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada), Ruslan Stefanchuk di Conference Hall, Gedung Parlemen Ukraina, Senin (11/7). Selain dengan pimpinan Parlemen Ukraina, delegasi juga berdiskusi dengan IPU Parlemen Ukraina.

Sebagai anggota IPU *Task Force* mewakili kawasan Asia Pasifik, Fadli

Zon menyampaikan keprihatinan atas dampak perang yang terjadi di Ukraina, terutama di wilayah Ukraina Timur. Disampaikan Fadli, melalui kunjungan ke Kyiv ini, IPU *Task Force* membawa misi untuk membuka kran dialog demi mengakhiri konflik.

"IPU *Task Force* juga menyampaikan komitmen untuk menjadi jembatan dialog antara Rusia dan Ukraina dalam mencari solusi damai melalui diplomasi parlemen. Secara konkret, IPU *Task Force* juga meminta Verkhovna Rada Parlemen Ukraina bersedia membuka dialog dengan pihak parlemen Rusia. Meskipun tak

mudah, jalan dialog dan diplomasi harus tetap terbuka sebagai pintu jalan keluar," kata politisi Partai Gerindra tersebut melalui keterangan persnya, Rabu (13/7).

Usai pertemuan, Delegasi IPU *Task Force* juga mengunjungi Dmytrivka Village, dimana terdapat banyak tank yang ditinggal tentara Rusia. Delegasi juga melihat langsung wilayah Bucha dan Irpin, kota kecil di utara Kyiv yang terdampak perang cukup parah berupa kerusakan bangunan tempat tinggal, pusat bisnis, dan sejumlah fasilitas publik. Kedatangan delegasi IPU *Task Force* disambut oleh Wali Kota Bucha dan Wali Kota Irpin.

Kunjungan delegasi ke Kyiv dilakukan melalui jalur darat dari Polandia yaitu dengan kendaraan roda empat dari Warsawa ke Stasiun Chelm, kota kecil di tenggara Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Dari Chelm, perjalanan dilanjutkan menggunakan kereta api selama 15 jam menuju Kyiv. Selain dengan Ketua Parlemen, IPU *Task Force* juga menggelar dialog dengan UN Resident Coordinator (Unicef, UNDP, WHO), Ukrainian Parliamentary Delegation to IPU, serta Prosecutor General of Ukraine. • [rnm,bia/sf](#)



FOTO: IST/MAN

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bersama perwakilan Inter-Parliamentary Union (IPU) *Task Force* menuju lokasi pemakaman massal di Bucha, Ukraina.



Scan QR untuk berita selengkapnya

ISU PRIORITAS P20

“Stronger Parliaments for Sustainable Recovery”



ISU PRIORITAS 1

PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
DAN EKONOMI HIJAU



ISU PRIORITAS 2

ISU-ISU YANG MENGEMUKA:
KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI,
DAN TANTANGAN-TANTANGAN
EKONOMI



ISU PRIORITAS 3

PARLEMEN EFEKTIF,
DEMOKRASI YANG DINAMIS



ISU PRIORITAS 4

INKLUSI SOSIAL,
KESETARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN